

## Jembatan Otista Kota Bogor akan Diresmikan 8 Desember Mendatang

**BOGOR (IM)**- Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor telah menetapkan akan meresmikan Jembatan Otista yang saat ini dalam pembangunan, pada 8 Desember 2023. Para kontraktor pun diminta untuk mempercepat proses pembangunan.

Wakil Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim mengatakan ada beberapa poin yang harus diselesaikan dalam waktu dekat. Hal itu pun membutuhkan usaha dan komitmen dari kontraktor dan pendukung lainnya.

“Nah tanggal 8 Desember ini kenapa ditetapkan sebagai peresmian, saya pikir ini sudah menjadi kesepakatan bersama sejak awal. Termasuk juga nanti kita akan lanjutkan langkah beautifikasi dengan perbaikan trotoar atau dengan perbaikan pengamanan melalui ducting,” kata Dedie di lokasi, Senin (30/10) kemarin.

Oleh karenanya, ia meminta masyarakat bersabar menanti proses pembangunan jembatan yang dulunya menjadi ‘biang kerok’ kemacetan menuju pusat Kota Bogor ini. Sebab, pembangunan Jembatan Otista ini cukup strategis sehingga membutuhkan kesabaran.

“Adanya pembangunan Jembatan Otista ini membuat masyarakat mungkin upaya mobilisasinya lebih berat, karena kemacetan dan keterbatasan ruang dan jalan. Itu yang saya ingin sampaikan apresiasi dan terimakasih pada masyarakat,” kata Dedie.

Di samping itu, Dedie mengatakan, saat ini kondisi menjelang musim hujan tengah dimanfaatkan oleh kontraktor untuk mempercepat pekerjaannya. Sehingga ketika

musim hujan tiba, pekerjaan bisa ditekankan semaksimal mungkin.

Ia berharap pembangunan Jembatan Otista bisa menjadi solusi permasalahan kemacetan di kawasan Sistem Satu Arah (SSA). Masyarakat juga bisa kembali beraktivitas dan berolahraga secara leluasa di SSA.

“Mudah-mudahan ini menjadi solusi, ya, yang tadinya selalu menjadi bottleneck di sini sehingga masyarakat bisa lebih leluasa mobilitas. Termasuk juga yang berolahraga dan bersepeda,” ucapnya.

Diketahui, latar belakang pembangunan Jembatan Otista ialah karena jembatan inj menjadi sumber kemacetan di Kota Bogor. Sejak diberlakukan Sistem Satu Arah (SSA) di Kota Bogor, jembatan ini menjadi bottle neck dan kerap menyebabkan kemacetan panjang.

Berdasarkan kajian, tidak ada pilihan lain kecuali melebarkan jembatan Otista untuk melancarkan arus lalu lintas. Sebetulnya pelebaran jembatan ini ingin dilakukan pada 2021, namun ditunda karena proses rasionalisasi sehubungan dengan sumber bantuan yang berasal dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat.

Untuk membangun Jembatan Otista, Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor mendapat bantuan dari Pemrov Jawa Barat, dengan angka sekitar Rp 49 miliar. ● **pra**

## Gobest Pemkab Bogor Masuk 10 Besar Nominasi Program I-SIM For Regencies 2023



Gobest Pemkab Bogor berhasil masuk 10 besar nominasi program I-SIM For Regencies 2023.

**BOGOR (IM)**- Gerakan Kabupaten Bogor Bebas Stunting (Gobest) berhasil masuk 10 besar dan lolos tahap penjurian pada program Indonesia Movement (I-SIM) For Regencies 2023. Hal tersebut diungkapkan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bogor, Burhanudin dalam Presentasi Program Unggulan Kabupaten pada I-SIM for Regencies di Graha Surveyor Indonesia (30/10).

Perlu diketahui bahwa dari 103 Kabupaten se-Indonesia, Kabupaten Bogor masuk 10 besar nominasi pada Program Integrated Sustainability Indonesia Movement (I-SIM) For Regencies 2023. Sebab program Gobest tersebut selaras dengan Sustainable Development Goals (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Gobest merupakan gerakan dalam mendorong terwujudnya Kabupaten Bogor dan Jawa Barat bebas Stunting yang diusung oleh Pemerintah Kabupaten Bogor. Gobest menjadi salah satu cara untuk mengoptimalkan aksi konvergensi penurunan angka stunting di Kabupaten Bogor.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bogor, Burhanudin mengungkapkan, Gobest dilaksanakan melalui delapan aksi konvergensi yang dilakukan secara sinergi dan kolaborasi dengan melibatkan seluruh perangkat daerah terkait dan berbagai sektor lainnya termasuk pihak swasta mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga monitoring dan evaluasi.

Gobest menjadi harapan baru dalam upaya menekan

prevalensi Stunting di Kabupaten Bogor dan juga membuka pintu bagi transformasi nyata dalam mencapai tujuan dari 17 goals SDGs,” ujar Burhanudin.

Lanjut Burhanudin, permasalahan kesehatan seperti Stunting ini merupakan amanat konstitusi yang membutuhkan intervensi yang kuat di masyarakat. Oleh karena itu, penguatan kolaborasi terus dilakukan antara pemerintah, dunia usaha, masyarakat, media serta perguruan tinggi dan lembaga pendidikan.

Menurutnya melalui program Gobest, Pemkab Bogor berhasil mempercepat penurunan Stunting di Kabupaten Bogor dari 9,9% pada tahun 2021 menjadi 4,78% di tahun 2022 dan 1,59% di tahun 2023.

“Dengan adanya program unggulan Gobest, langkah-langkah terus kami tingkatkan dengan memadukan tenaga, daya dan upaya dalam mengintegrasikan berbagai program baik internal maupun eksternal,” jelas Sekda.

Dalam kesempatan ini, Sekda meminta kepada seluruh perangkat daerah untuk mendukung optimalisasi intervensi Stunting guna terwujudnya Kabupaten Bogor Bebas Stunting. Bahkan ia juga terus meningkatkan kolaborasi dengan dunia usaha untuk optimalisasi program CSR dalam mendukung Gobest. “Upaya kolaborasi program kami lakukan dengan internal sesama dinas maupun melalui CSR dengan pihak swasta untuk percepatan penurunan Stunting. Saya juga minta semua dinas dukung intervensi stunting dengan baik,” tukas. ● **gio**

# 8 | Nusantara



## UJI EMISI KENDARAAN GRATIS DI BOGOR

Petugas melakukan uji emisi kendaraan di lingkaran Stadion Pakansari, Kabupaten Bogor, Selasa (31/10). Pemerintah Kabupaten Bogor menggelar uji emisi gratis untuk kendaraan bermotor, yang merupakan bagian dari rencana pengelolaan kualitas udara perkotaan.

INGIN FOKUS DALAM MENITI KARIR DI KEPOLISIAN

## Mantan Kapolres Bogor Mundur dari Pencalonan Penjabat Bupati Bogor

Dari empat calon Penjabat Bupati Bogor yaitu Engkus Sutisna, Adang Suptandar, AKBP Iman Imanudin dan pejabat yang diusulkan pemerintah pusat, kini tersisa tiga calon, karena mantan Kapolres Bogor tidak mau dicalonkan,” kata Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Rudy Susmanto.

**BOGOR (IM)**- Calon Penjabat Bupati Bogor tersisa tiga orang, setelah satu orang di antaranya mengundurkan diri dari pencalonan.

Salah satu orang yang mundur dari calon Penjabat Bupati Bogor tersebut ialah AKBP Iman Imanudin, mantan Kapolres Bogor yang

kini menjabat Wakil Direktur Reserse Narkotika Polda Metro Jaya.

Alumni Akpol Tahun 2002 itu mengundurkan diri atau tidak mau dicalonkan menjadi Penjabat Bupati Bogor, karena ia ingin fokus dalam meniti karirnya di kepolisian.

“Dari empat calon Penjabat Bupati Bogor yaitu Engkus Sutisna, Adang Suptandar, AKBP Iman Imanudin dan pejabat yang diusulkan pemerintah pusat. Kini tersisa tiga calon, karena mantan Kapolres Bogor tidak mau dicalonkan karena ingin fokus berkarir di kepolisian,” kata Ketua DPRD Kabupaten Bo-

gor, Rudy Susmanto kepada wartawan, Selasa (31/10).

Rudy Susmanto menuturkan, bahwa DPRD Kabupaten Bogor berkeinginan membuat acara diskusi, antara legislatif, eksekutif dengan para Calon Penjabat Bupati Bogor.

“Tentunya kami ingin mendengar buah pikiran dari para calon Penjabat Bupati Bogor, kami juga ingin mensharing hasil Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun 2024,” tutur Rudy Susmanto.

Politisi Partai Gerindra ini menerangkan walaupun jajarannya memberikan reko-

mendasi, namun apapun keputusan pemerintah pusat terkait penunjukan Penjabat Bupati Bogor akan diterima.

“Kami hanya merekomendasi nama Calon Penjabat Bupati Bogor, siapapun yang dipilih pemerintah pusat, tak akan ada penolakan,” terangnya.

Dari informasi yang dihimpun, masa jabatan Bupati Bogor, Iwan Setiawan akan habis di akhir Tahun 2023, selanjutnya hingga Bupati Bogor terpilih dan dilantik dalam ajang pemilihan Bupati Bogor pada 10 November 2024 mendatang, maka Kabupaten Bogor akan dipimpin seorang Penjabat Bupati Bogor. ● **gio**

## Pemkab Bogor dan DPRD Setujui KUA dan PPAS Tahun 2024

**BOGOR (IM)**- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bogor, menandatangani nota kesepakan bersama terhadap Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun anggaran 2024.

Penandatanganan dilakukan pada acara Rapat Paripurna, di Ruang Rapat Paripurna DPRD, Cibinong, Senin (30/10).

Penandatanganan dilakukan oleh Wakil Bupati Bogor, Burhanudin bersama Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Rudy Susmanto.

Rapat dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Bogor, diwakili Wakil Ketua DPRD, jajaran anggota DPRD, perwakilan Forkopimda dan Pemkab Bogor.

Selain itu, terdapat dua agenda Rapat Paripurna lainnya, yakni penyampaian dua Raperda, yaitu Raperda tentang Fasilitas Penyelenggaraan Pesantren dan Raperda tentang Rencana Tata Ruang

Wilayah Kabupaten Bogor Tahun 2023-2043.

Selain itu, penyampaian permohonan ruislag, tukar menukar tanah dan bangunan SMPN 03 Gunung Putri di Desa Ciangsan Kecamatan Gunung Putri oleh PT. Kurnia Subur Permai.

Plh. Bupati Bogor, Burhanudin menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada pimpinan dan anggota DPRD atas berbagai saran dan masukan selama pembahasan intensif di tingkat Badan Anggaran bersama seluruh perangkat daerah, sehingga KUA PPAS tahun anggaran 2024 dapat disepakati bersama hari ini.

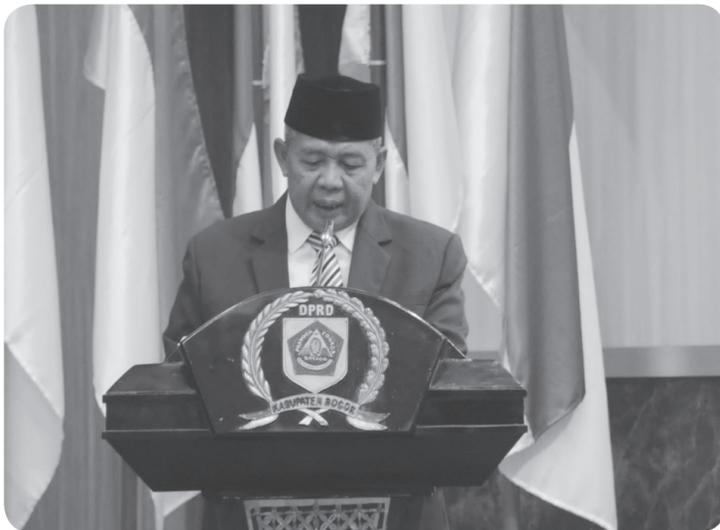
“Dalam nota kesepakatan KUA PPAS tahun 2024, kebijakan difokuskan pada pelayanan publik serta mendukung pencapaian prioritas pembangunan baik pemerintah pusat atau provinsi dan pemerintah daerah yang termuat dalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) tahun 2024 – 2026 sesuai kemampuan keuangan daerah,” kata Burhanudin mewakili Plt Bupati mengingat

Iwan Setiawan tengah bertugas ke negara Eropa.

Burhanudin melanjutkan, dalam rangka meningkatkan kualitas belanja daerah dalam APBD serta mendukung percepatan pencapaian target pembangunan, Pemkab Bogor bersama DPRD memprioritaskan alokasi kepada anggaran belanja pokok dibandingkan dengan belanja penunjang.

“Pemkab Bogor bersama DPRD juga telah menetapkan arah kebijakan ekonomi daerah yaitu penguatan regulasi pendukung, penyediaan infrastruktur pendukung pengembangan ekonomi, optimalisasi pendapatan daerah dan peningkatan kerjasama yang mendorong penguatan ekonomi,” ujar Burhanudin.

Burhanudin juga mengungkapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pimpinan beserta seluruh anggota DPRD yang telah memberikan respon positif terhadap pengajuan dua Raperda dan satu permohonan ruislag yang disampaikan pada agenda Rapat Paripurna tersebut. ● **gio**



Plt Bupati Bogor, Burhanudin saat menandatangani MOU KUA dan PPAS Tahun 2024.

## ANUGRAH MEDIA HUMAS 2023

### Diskominfo Kab. Bogor Sabet Juara Tiga Tingkat Nasional



Diskominfo Kabupaten Bogor menerima penghargaan juara ketiga Tingkat Nasional Tahun 2023 kategori penerbitan media internal, pada ajang anugerah media humas.

**BOGOR (IM)**- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor kembali meraih penghargaan terbaik ke tiga tingkat Nasional Kategori Penerbitan Media Internal (Inhouse Magazine) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota tahun 2023. Perolehan penghargaan pada ajang Anugerah Media Humas (AMH) dan Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, berlangsung di The Westin Hotel Surabaya, Senin malam, (30/10).

Perlu diketahui penerbitan Media Internal yang dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Bogor yakni Majalah Inovasi yang dibangun sejak tahun 2010 lalu. Telah berhasil meraih penghargaan tingkat Nasional dalam kegiatan bergengsi Anugerah Media Humas (AMH), yakni AMH tahun 2012 terbaik pertama tingkat Nasional, kemudian AMH tahun 2013 meraih penghargaan terbaik tiga tingkat Nasional dan pada AMH tahun 2023 Pemkab Bogor kembali meraih penghargaan terbaik ketiga tingkat Nasional.

Sekretaris Diskominfo Kabupaten Bogor, Nia Indrawati menyatakan, rasa syukur karena Pemkab Bogor kembali meraih penghargaan Anugerah Media Humas (AMH) 2023 kategori, yang sebelumnya telah meraih penghargaan AMH tahun 2021 kategori Siaran Pers terbaik ketiga tingkat nasional. investasi dan kerjasama yang pada akhirnya berkontribusi pada pembangunan bangsa dan kemajuan negeri.

“Selamat kepada semua penerima anugerah humas malam ini. Semoga makin bersemangat dalam berkarya dan berkarya,” tegas Nia Indrawati.

Dirjen IKP Kemkominfo RI, Usman Kansong mengatakan bahwa di era digitalisasi peran humas sangat penting dalam meningkatkan eksistensi dan branding negara dengan menjalankan misinya melalui pengelolaan media sosial, website, penerbitan media internal, siaran pers, dan media audiovisual. Seluruhnya memiliki karakteristik yang beragam sehingga membutuhkan perlakuan berbeda-beda pula.

“Untuk itu, diperlukan satu langkah strategis dalam mengelola media komunikasi publik tersebut. Keahlian dalam menyusun strategi komunikasi publik dan mengimplementasikannya serta mengukur dampaknya secara nyata menjadi kunci keberhasilan program yang dijalankan humas,” tutur Dirjen IKP.

Menurutnya dalam menjalankan peran humas sinergitas juga perlu diperkuat untuk membranding sebuah negara. Terlebih Indonesia dikenal sebagai negara yang bersahabat, bermartabat, dan memiliki banyak potensi. Dengan branding yang baik maka akan mendatangkan investasi dan kerjasama yang pada akhirnya berkontribusi pada pembangunan bangsa dan kemajuan negeri.

“Selamat kepada semua penerima anugerah humas malam ini. Semoga makin bersemangat dalam berkarya dan berkarya,” tandasnya. ● **gio**